



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Kabag Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Saman	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha Nyoman Buradarma

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

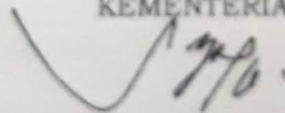
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi, satuan kerja, dan/atau unit pelaksana pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam menyelenggarakan pelayanan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,





CALIADI

Kabag Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Buddha	Revisi Ditjen Bimas Buddha Nyoman Purandharma
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

No.	Nama Standar Pelayanan
1	Standar Pelayanan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
2	Standar Pelayanan Persetujuan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA)/Notifikasi
3	Standar Pelayanan Persetujuan Pembebasan Biaya Dana Kompensasi Penggunaan (DKP/0 Rupiah) Orang Asing
4	Standar Pelayanan Persetujuan Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB)
5	Standar Pelayanan Persetujuan Visa Tinggal Terbatas (VTT)
6	Standar Pelayanan Persetujuan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
7	Standar Pelayanan Persetujuan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
8	Standar Pelayanan Persetujuan Naturalisasi Rohaniawan Asing
9	Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Rohaniawan Agama Buddha
10	Standar Pelayanan Pemberian Piagam Penghargaan Tokoh Agama Buddha Indonesia
11	Standar Pelayanan Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha
12	Standar Pelayanan Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha
13	Standar Pelayanan Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Organisasi Keagamaan Buddha
14	Standar Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha
15	Standar Pelayanan Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang Keagamaan Buddha
16	Standar Pelayanan Rekomendasi Bebas Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Rumah Ibadah Agama

Ketag. Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Islam	Sekretaris Direksi Agama Buddha Indonesia
	



17	Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha
18	Standar Pelayanan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Swasta (PTKBS)
19	Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB)
20	Standar Pelayanan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB)

**JENIS PELAYANAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

No.	Jenis Pelayanan	Definisi	Masyarakat yang Dilayani
1	Pelayanan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Pelayanan memberikan izin penggunaan Tenaga Kerja Asing	Tenaga Asing
2	Pelayanan Persetujuan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA)/Notifikasi	Pelayanan memberikan persetujuan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA)/Notifikasi	Tenaga Asing
3	Pelayanan Persetujuan Pembebasan Biaya Dana Kompensasi Penggunaan (DKP/0 Rupiah) Orang Asing	Pelayanan memberikan Persetujuan Pembebasan Biaya Dana Kompensasi Penggunaan (DKP/0 Rupiah) Orang Asing	Orang Asing
4	Pelayanan Persetujuan Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB)	Pelayanan memberikan Persetujuan Visa Kunjungan Sosial Budaya	Orang Asing/ Tenaga Asing
5	Pelayanan Persetujuan Visa Tinggal Terbatas (VTT)	Pelayanan memberikan izin tinggal terbatas bagi orang asing	Orang Asing/ Tenaga Asing
6	Pelayanan Persetujuan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)	Pelayanan memberikan izin tinggal sementara bagi orang asing	Orang Asing/ Tenaga Asing
7	Pelayanan Persetujuan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	Pelayanan memberikan izin tinggal tetap bagi orang asing	Orang Asing/ Tenaga Asing

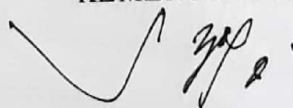
Kabang Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Buddha	Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha
--	---

3	Pelayanan Persetujuan Naturalisasi Rohaniawan Asing	Pelayanan Persetujuan Naturalisasi Rohaniawan Asing	Rohaniawan Asing
9	Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Rohaniawan Agama Buddha	Pelayanan pembuatan kartu rohaniawan	Rohaniawan Agama Buddha
0	Pelayanan Pemberian Piagam Penghargaan Tokoh Agama Buddha Indonesia	Pelayanan Pemberian Piagam Penghargaan Tokoh Agama Buddha Indonesia	Tokoh Agama Buddha
1	Pelayanan Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha	Pelayanan untuk menerbitkan tanda daftar sesuai ketentuan yang berlaku	Organisasi Keagamaan Buddha
12	Pelayanan Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha	Pelayanan untuk menerbitkan tanda daftar untuk legalitas Rumah Ibadah sesuai ketentuan yang berlaku	Organisasi Keagamaan Buddha
13	Pelayanan Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Organisasi Keagamaan Buddha	Pelayanan menerbitkan rekomendasi kepemilikan tanah Organisasi Keagamaan Buddha	Organisasi Keagamaan Buddha
14	Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha	Pelayanan memberikan rekomendasi izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha	Organisasi/ Lembaga Keagamaan Buddha
15	Pelayanan Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang Keagamaan Buddha	Pelayanan memberikan Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang Keagamaan Buddha	Organisasi/ Lembaga/ Yayasan Keagamaan Buddha
16	Pelayanan Rekomendasi Bebas Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Rumah Ibadah Agama	Pelayanan memberikan Rekomendasi Bebas Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Rumah Ibadah Agama	Organisasi/ Lembaga Keagamaan Buddha
17	Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha	Pelayanan memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha sesuai ketentuan yang berlaku	Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha



Kabag Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Saiman	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha Nyoman Sunadarma
	

18	Pelayanan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Swasta (PTKBS)	Pelayanan memberikan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Swasta (PTKBS) sesuai ketentuan yang berlaku	Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha
19	Pelayanan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB)	Pelayanan memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) sesuai ketentuan yang berlaku	Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha
20	Pelayanan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB)	Pelayanan memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) sesuai ketentuan yang berlaku	Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,



CALIADI 1

Kabag Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Saiman	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha Nyoman Sunadarma
	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 06 Lantai 15-16 Jakarta 10340
Telepon (021) 3810671-3810701-3920580 Faksimile (021) 3521325 PO BOX 3702 JKT
Website : <http://bimabuddha.kemenag.go.id>





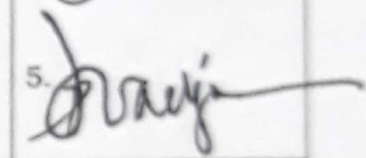
BERITA ACARA
NOMOR: 3542/Dj.VII/Set.VII.3/OT.01.3/12/2018

Pada hari Senin tanggal Sepuluh Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah menyetujui Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat urusan dan pendidikan Agama Buddha untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan pada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, yang meliputi Pelayanan :

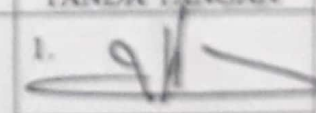
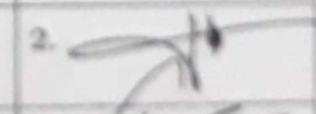

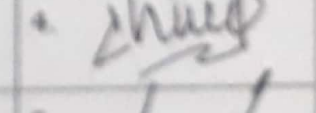
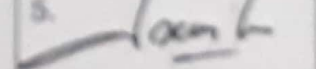
- A. Layanan Pada Subdit Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha
- B. Layanan Pada Subdit Pendidikan Tinggi
 - 1. Izin Pendirian PTKB
 - 2. Izin Pembukaan Prodi
 - 3. Izin Operasional Prodi
- C. Layanan Pada Subdit Penyuluhan
 - 1. Persetujuan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA)
 - 2. Persetujuan Izin Menggunakan TKA (IMTA)
 - 3. Persetujuan Pembebasan DKP
 - 4. Persetujuan VKSB/VTT
 - 5. Persetujuan KITAS/KITAP/NATURALISASI
 - 6. Penerbitan Kartu Rohaniwan Agama Buddha
- D. Layanan Pada Subdit Kelembagaan
 - 1. Pendaftaran Perkumpulan/Majelis Agama Buddha
 - 2. Pendaftaran Yayasan Keagamaan Buddha
 - 3. Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Keagamaan
 - 4. Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
 - 5. Rekomendasi bebas bea masuk barang keagamaan
 - 6. Rekomendasi bebas pajak bumi dan bangunan rumah ibadah.

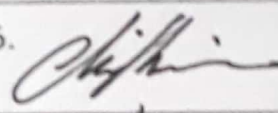
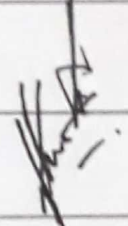
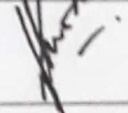
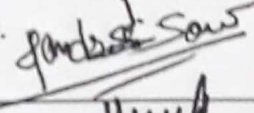
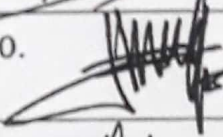
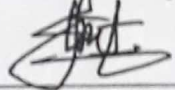
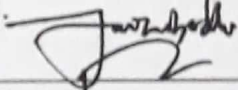
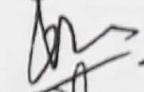

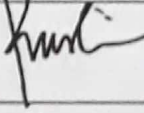
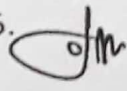
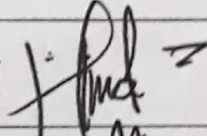
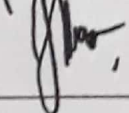

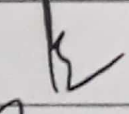
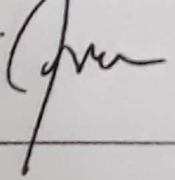
Dari semua Standar layanan yang telah di dibahas dan di sepakati bersama, selanjutnya akan dipublikasikan secara manual maupun elektronik, demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

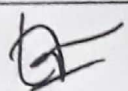
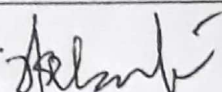


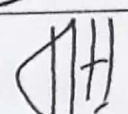
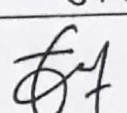
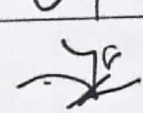
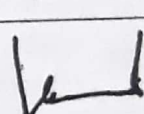
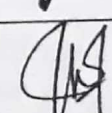
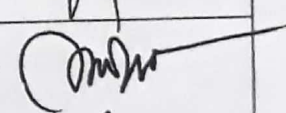
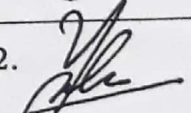
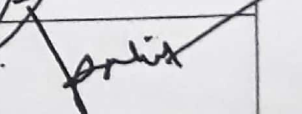
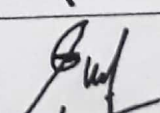
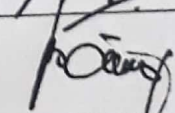
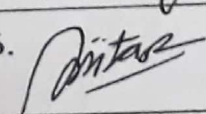
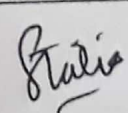
PENYELENGGARA PELAYANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Caliadi, SH, MH	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.	1. 
2.	Drs, Supriyadi, M.Pd	Direktur urusan dan Pendidikan Agama Buddha.	2. 
3.	Saiman, S.S., M.Si	Kasubdit Penyuluhan pada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.	3. 
4.	Karsan, S.Ag., M.Pd	Kasubdit Kelembagaan pada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.	4. 
5.	Paniran, S.Ag., M.Si.,M.Pd.B	Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah pada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	5. 
6.	Parwadi, S.Ag., MM., M.Pd.d	Kasubdit Pendidikan Tinggi pada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.	6.

PENGGUNA PELAYANAN

NO	NAMA	INSTANSI ASAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum	STABN Sriwijaya, Tangerang	1. 
2.	Sulasman Mulyono, SE, M.Pd	Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Jakarta	2. 
3.	Stephani A. Surya	Perhimpunan Majelis Agama Buddha Indonesia (PERMABUDHI), Jakarta	3. 
4.	Henry Gunawan Chandra	Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), Jakarta	4. 
5.	Pdt. Gouw Tjeng Sun, S.D.B	Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia (MAJUBUTHI), Jakarta	5. 

6.	Bong Tji Phin	Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia (MAGABUTRI), Jakarta	6. 
7.	Katherine	Majelis Agama Buddha I Kuan Tao Indonesia (MABIKTI), Jakarta	7. 
8.	C. Subrata Hakim	KASI (Konferensi Agung Sangha Indonesia), Jakarta	8. 
9.	Souw Tjie Lian, S.Ag., M.Pd.B	Majelis Agung Penghayat Tridharma Indonesia (MAPTRI), Jakarta	9. 
10.	Ester Setiawati Santoso, SH., M.Kn	Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia, Jakarta	10. 
11.	Suwito, M.Pd.B	Majelis Mahayana Indonesia (MAHASI), Jakarta	11. 
12.	Tjoa Suntoro	Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI), Jakarta	12. 
13.	Sukadi	Majelis Niciren Syosyu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI), Jakarta	13. 
14.	Agustina	Yayasan Pandita Sangha Buddha Dhamma Indonesia (YPSBDI), Jakarta	14. 
15.	Drs. Rusli., SH	Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI), Jakarta	15. 
16.	Eko Ciono	Majelis Agama Buddha Tantrayana Zenfo Zong Kasogatan (ZFZ KASOGATAN), Jakarta	16. 
17.	Hendri	Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia (MAJUBUMI), Jakarta	17. 
18.	Irfan Sunardi	Majelis Agama Buddha Mahanikaya Indonesia (MBMI), Jakarta	18. 
19.	Adhi Purwanto	Majelis Agama Buddha Tantrayana Sukhavati Indonesia, Jakarta	19. 
20.	Suhadi Sendjaja	Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Jakarta	20. 
21.	Heru Prayitno	Majelis Rohaniwan Tridharma Seluruh Indonesia (MARTRISIA), Jakarta	21. 

22.	Tan Evi	Soka Gakai Indonesia (SGI), Jakarta	22. 
23.	Neneng Setiawati	Perkumpulan Palpung Thubten Choekhorling, Jakarta	23. 
24.	Karsan, S.Ag., M.Pd	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	24. 
25.	Saiman, S.S., M.Si	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	25. 
26.	Ning Subekti, S.Ag., M.Pd.B	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	26. 
27.	Siti Wigati, S.Sos., M.Si	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	27. 
28.	Sutarno, S. IP	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	28. 
29.	Joko Budi Santosa, SE	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	29. 
30.	Kasilah, S.Ag.	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	30. 
31.	Budi Sulistiyo, S.Ag., M.Pd.B	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	31. 
32.	Yon Hasa, S.Ag	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	32. 
33.	Pandhit Amanvijaya, S.Ag., M.M., M.Pd.B	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	33. 
34.	Sukasdi, S.E., MA	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	34. 
35.	Bambang Budi Supranoto, S.Ag	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	35. 
36.	Sigit Prajoko, S.Ag	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	36. 
37.	Tatik, S.Ag.	Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat	37. 



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 191 TAHUN 2017
TENTANG
VISI, MISI DAN MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu disusun visi, misi, dan maklumat pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 285);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); †

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG VISI, MISI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA.

KESATU : Menetapkan Visi, Misi, dan Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Visi, Misi, dan Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dimaksud dalam DIKTUM KESATU ini wajib disosialisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha serta digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ¶

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



Kabag OKH	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
¶	✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 191 TAHUN 2017
TENTANG
VISI, MISI DAN MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

VISI PELAYANAN

Terwujudnya Pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang Cepat, Mudah dan Gratis

MISI PELAYANAN

1. Mewujudkan Pelayanan Urusan Agama Buddha Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Agama Buddha Berbasis Teknologi Informasi
3. Mewujudkan Pelayanan Tata Kelola Dukungan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

